

ABSTRAK

Berbagai negara di seluruh dunia mengembangkan teknologi senjata otonom, namun di sisi lain timbul upaya untuk menjadikan sistem senjata otonom sebagai senjata yang dilarang penggunaannya sebab adanya kekhawatiran senjata ini dapat melukai sipil apabila terjadi suatu kesalahan. Senjata tersebut tidak dilarang untuk dikembangkan begitu saja. Berdasarkan hal tersebut muncul tiga pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian hukum ini: apa urgensi terbentuknya grup tersebut; bagaimana perannya dalam mengawasi pengembangan dan penggunaan senjata otonom; mengapa senjata otonom tidak dilarang penggunaannya. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka. Data tersebut bersumber dari peraturan-peraturan hukum internasional, hasil-hasil konferensi, dan karya-karya ilmiah terkait hukum humaniter internasional, organisasi internasional, dan sistem senjata otonom. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Urgensi PBB membentuk *Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons System* adalah munculnya kekhawatiran senjata otonom mencederai hukum humaniter internasional walau memiliki keunggulan daripada personil manusia, sehingga perlu diawasi. Kelompok ini berperan memeriksa dan mengawasi isu-isu terkait teknologi otonom supaya tetap sesuai dengan tujuan *Convention on Certain Conventional Weapons* (CCW). Senjata otonom tidak dilarang sebab belum tentu merupakan senjata yang dapat menimbulkan penderitaan yang berlebihan. Senjata otonom tidak seharusnya dilarang begitu saja, karena tidak hanya berguna sebagai kombatan, tetapi juga berguna sebagai logistik, medis dan pelacak. Oleh karena itu dibutuhkan aturan internasional mengenai pertanggungjawaban atas penggunaan senjata otonom dan didirikan badan internasional yang dapat menjamin hukum dan HAM terkait penggunaan senjata otonom.

Kata kunci: senjata otonom, GGE on LAWS, Konvensi CCW.

ABSTRACT

Various countries around the world are developing autonomous weapons technology, but on the other hand there are efforts to make autonomous weapons systems a prohibited weapon because there are concerns that these weapons could injure civilians if something goes wrong. These weapons are not prohibited from being developed just like that. Based on this, there are three main problems that will be examined in this legal research: what is the urgency for the formation of the group; what is its role in overseeing the development and use of autonomous weapons; why autonomous weapons are not prohibited from using them. The research method uses a normative juridical approach, namely by examining secondary data or library materials. The data is sourced from international legal regulations, conference results, and scientific works related to international humanitarian law, international organizations, and autonomous weapons systems. The collected data were analyzed qualitatively. The urgency of the United Nations to form Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons System is the emergence of concerns that autonomous weapons can harm international humanitarian law even though it has advantages over human personnel, so it needs to be monitored. This group has a role in examining and supervising issues related to autonomous technology in order to stay in line with the objectives of the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW). Autonomous weapons are not prohibited because they are not necessarily weapons that can cause excessive suffering. Autonomous weapons should not be banned for granted, as they are not only useful as combatants, but also as logistical, medical and tracking functions. Therefore, international rules are needed regarding accountability for the use of autonomous weapons and the establishment of an international body that can guarantee law and human rights related to the use of autonomous weapons.

Keywords: *autonomous weapon, GGE on LAWS, CCW Convention.*